

Evaluasi Kelembagaan KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

RUMUSAN MASALAH

Menurut DPR RI, KASN kurang efektif dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, KASN diusulkan untuk dihapus dari Draf RUU Perubahan UU ASN.

1. Bagaimana peran lembaga KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia?
2. Bagaimana dampak kehadiran KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia? Apa yang memengaruhi efektivitasnya?
3. Bagaimana lingkungan politik memberikan dukungan terhadap kerja KASN?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis peran KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia.
2. Menganalisis dampak kehadiran KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KASN.
3. Menganalisis lingkungan politik yang memengaruhi kerja KASN.

KEGUNAAN PENELITIAN

Memberikan masukan kepada DPR RI (Pansus Perubahan UU ASN) terkait dengan keberadaan KASN, apakah relevan untuk dihapuskan dan digantikan perannya oleh KemenPAN & RB.

PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan kualitatif.

INFORMAN

Komisioner KASN; Anggota DPR RI Pengusul Perubahan UU ASN; Deputi Kelembagaan Kementerian PAN dan RB; Deputi LAN; Kepala BKN; Kepala BKN Kantor Regional di Daerah; Sekjen K/L; Sekda Provinsi/kabupaten; Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Akademisi; LSM yang *concern* terhadap birokrasi.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Wawancara, dokumen, dan diskusi terfokus.

TEKNIK ANALISIS DATA

Studi literatur, wawancara, *focus group discussion* (FGD).

Menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data interaktif, dimana aktivitas reduksi data, *display data*, dan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang dikumpulkan sudah jenuh.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
26 Februari – 4 Maret 2018



TEMUAN HASIL PENELITIAN (INTERIM)

**Peran KASN masih sangat diharapkan
dalam mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia.**

Berhasil mengurangi intervensi politik dalam manajemen ASN, khususnya dalam pengangkatan JPT di pusat dan daerah. ✓



KASN masih kurang didukung secara politik, terutama dari DPR. Hal ini tampak dari anggaran KASN yang semakin menurun, bahkan keberadaannya hendak dihapuskan. Padahal, dalam berbagai pengalaman reformasi birokrasi di banyak negara, tujuan reformasi birokrasi akan cepat tercapai apabila mendapat dukungan politik yang cukup besar.

Faktor yang memengaruhi efektivitas KASN:

1. SDM KASN masih kurang. Akibatnya, pemerintah daerah harus berulang kali datang ke Jakarta untuk melaporkan mulai dari pembentukan panel hingga penentuan kandidat.
2. KASN dinilai belum memiliki data informasi pegawai yang masih berada di tangan BKN. Hal ini mengakibatkan KASN kurang dapat memastikan laporan dari daerah sudah benar atau tidak terkait syarat administrasi kandidat JPT.
3. Produk kerja KASN hanya bersifat rekomendasi. Hal ini dinilai kurang efektif.



Tim Peneliti:

Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Aryojati Ardipandanto, S.IP.
Dewi Sendhikasari D., S.IP., MPA
Aulia Fitri, S.IP., M.Si. (Han).